

***EXECUTIVE SUMMARY***  
**PENYUSUNAN KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
(KLHS)**

**RPJMD KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021 - 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
Jl. Raya Siwalanpanji No 36, Buduran  
Telp (031) 8963184



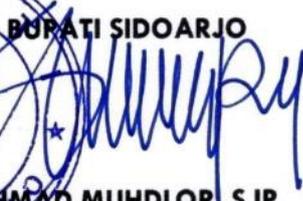
## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam RPJMD dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup strategis merupakan salah instrumen untuk mengarahkan agar rencana dan program yang disusun mengarah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penyusunan dokumen KLHS ini mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD.

Dengan selesainya dokumen ini diucapkan terima kasih kepada Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJM Kabupaten Sidoarjo yang telah bersusah payah menyelesaikan dokumen ini. Kepada nara sumber dari berbagai stakeholder yang memberikan masukan selama uji publik diucapkan terima kasih. Selain itu juga diucapkan beribu terima kasih kepada tim pendamping penyusunan dokumen KLHS ini.

Sidoarjo, 13 Juli 2021

The official seal of Kabupaten Sidoarjo, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI SIDOARJO' and 'SIDOARJO'.  
**BUPATI SIDOARJO**  
  
**AHMAD MUHDLOR S.IP.**

# DAFTAR ISI

<b>1.1</b>	<b>LATAR BELAKANG .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2</b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3</b>	<b>DASAR HUKUM .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4</b>	<b>RUANG LINGKUP .....</b>	<b>9</b>
	1.4.1 RUANG LINGKUP WILAYAH .....	9
	1.4.2 RUANG LINGKUP MATERI .....	9
<b>2.1</b>	<b>PELAKSANAAN TPB .....</b>	<b>14</b>
	2.1.1 Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)....	15
	2.1.2 Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target (SB).....	15
	2.1.3 Target TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target.....	16
	2.1.4 Target TPB Yang Belum/Tidak Ada Data (NA) .....	16
	2.1.5 Indikator Bukan Kewenangan Kabupaten.....	17
<b>2.2</b>	<b>KEMAMPUAN APBD UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT TPB .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3</b>	<b>PERAN PIHAK DALAM PENCAPAIAN TPB .....</b>	<b>20</b>
<b>3.1</b>	<b>PENJARINGAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2</b>	<b>PENENTUAN ISU PRIORITAS .....</b>	<b>24</b>
<b>4.1</b>	<b>SKENARIO PENINGKATAN INDIKATOR TPB PRIORITAS.....</b>	<b>29</b>
<b>4.2</b>	<b>REKOMENDASI.....</b>	<b>37</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kemampuan APBD Pada Masing-masing TPB.....	19
Tabel 3.1	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dengan TPB...	23
Tabel 3.2	Pembobotan Masing-masing Kriteria Yang Digunakan Untuk Menentukan TPB Prioritas.....	24
Tabel 3.3	Pembobotan Untuk Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas.....	25
Tabel 3.4	Indikator Yang Belum Mencapai Target Nasional dalam TPB Prioritas.....	27
Tabel 4.1	Indikator TPB Prioritas Kabupaten Sidoarjo .....	29
Tabel 4.2	Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 1.4.1 (d).....	30
Tabel 4.3	Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 2.1.2* .....	32
Tabel 4.4	Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 3.4.1 (a).....	33
Tabel 4.5	Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 4.1.1(d).....	34
Tabel 4.6	Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 8.9.1* .....	36
Tabel 4.7	Perumusan Rekomendasi KLHS Pilar Sosial.....	38
Tabel 4.8	Perumusan Rekomendasi KLHS Pilar Ekonomi.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Capaian TPB Kabupaten Sidoarjo.....	14
Gambar 2.2	Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai.....	15
Gambar 2.3	Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Belum Tercapai .....	15
Gambar 2.4	Capaian TPB Belum Dilaksanakan, Belum Mencapai Target .....	16
Gambar 2.5	Capaian TPB Kategori Belum/Tidak Ada Data .....	16
Gambar 2.6	Capaian TPB Kategori Indikator Bukan Kewenangan Kabupaten .....	17
Gambar 2.7	Grafik Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Total Realisasi Anggaran Per TPB Tahun 2020 .....	18
Gambar 2.8	Grafik Perbandingan Anggaran CRS pada Masing-masing TPB Pada Tahun 2019-2020 di Kabupaten Sidoarjo .....	21

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa permasalahan yang masih perlu terus menerus menjadi perhatian untuk diselesaikan secara optimal. Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tataran kegiatan melalui berbagai instrument, antara lain dokumen lingkungan dan kajian-kajian teknis lainnya, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 disebutkan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menyatakan, bahwa KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Dalam upaya memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah menyatakan, bahwa isu strategis merupakan rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2020 telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan ketentuan perundangan bahwa Kepala Daerah terpilih harus Menyusun dokumen RPJMD sebagai salah satu dasar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan di masa mendatang. Rangkaian proses penyusunan RPJMD antara lain terdiri dari Rancangan Teknokratik RPJMD, KLHS RPJMD, Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan Akhir RPJMD. Maka dari itu dalam mendukung proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, maka dilakukan pula “Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026”.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terhadap kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah

1. Mengidentifikasi Kondisi atau gambaran umum Kabupaten Sidoarjo
2. Melakukan analisis daya dukung dan daya tampung daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Melakukan analisis terhadap Relevansi target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terhadap target dan indikator capaian rencana pembangunan yang terdapat di dalam dokumen RPJMD, analisis capaian daerah terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan analisis capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
4. Mengidentifikasi Isu strategis dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
5. Mengetahui Tujuan dan Sasaran Strategis yang dapat dicapai dalam Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu dan permasalahan yang teridentifikasi
6. Merumuskan Alternative scenario dan rekomendasi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup

### 1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

## **1.4 RUANG LINGKUP**

### **1.4.1 RUANG LINGKUP WILAYAH**

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal sebagai kota Delta. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo 112,50 - 112,90 BT dan 7,30 – 7,50 LS. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar 71.424,3 ha dan luas wilayah lautan sampai dengan 4 mil ke arah laut atau sebesar 201,6868 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 31 kelurahan dan 322 desa. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo meliputi Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono.

Batas administrasi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

### **1.4.2 RUANG LINGKUP MATERI**

#### **1.4.2.1. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan**

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

- Kondisi umum daerah, paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.
- Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa analisis kontribusi.

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.

#### **1.4.2.2. Perumusan Skenario dan Rekomendasi**

Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Yang dimaksud dengan target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun indikator-indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi 7 “kategori pertama” dengan tanda (\*) adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua” dengan keterangan huruf ((a), (b), ...) di belakang nomor adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga” tanpa tambahan keterangan adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.
- Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
- Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan: (a) pencapaian target tanpa upaya tambahan; (b) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; (c) potensi, daya saing dan inovasi daerah; (d) daya dukung dan daya tampung daerah; (e) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Alternatif proyeksi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah.

- Isu Strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- Permasalahan berupa tantangan pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Sasaran Strategis berupa kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu Strategis dan permasalahan.

#### **1.4.2.3. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS**

##### **A. Penjaminan kualitas KLHS.**

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD dibuktikan dengan :

- Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
- Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan;
- Laporan KLHS RPJMD.

Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD, pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan cara : (a) penilaian bertahap; dan/atau (b) penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Penilaian mandiri bertahap dilakukan 2 (dua) kali pada saat : (a) setelah tahapan pengkajian selesai; dan (b) setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selesai. Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan pengkajian selesai memuat informasi tentang:

- Pemenuhan kualitas hasil dan ketentuan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS sampai dengan tahapan pengkajian; dan
- Rekomendasi perbaikan KLHS dan penyempurnaan proses pembuatan dan pelaksanaan tahap selanjutnya.

Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selesai memuat informasi tentang:

- KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- Rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Penilaian mandiri sekaligus dilakukan secara keseluruhan setelah KLHS selesai dibuat dan diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Hasil penilaian mandiri sekaligus memuat informasi tentang:

- KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS;

- Rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Penilaian mandiri, harus mempertimbangkan: (a) dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan (b) laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan. Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

#### **B. Pendokumentasian KLHS.**

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS. Laporan KLHS memuat informasi tentang :

- Dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- Metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- Metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
- Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
- Hasil penjaminan kualitas KLHS.

#### **C. Ringkasan Eksekutif.**

Laporan KLHS menjadi informasi pendukung : (a) sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan (b) sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamankan bahwa Laporan KLHS dilengkapi dengan :

- Ringkasan Eksekutif hasil kajian pembangunan berkelanjutan;
- Kajian terhadap Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;
- Lampiran :
  - ⇒ Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;
  - ⇒ Peta Potensi Dampak Pembangunan Daerah;
  - ⇒ Peta Rekomendasi Alternatif Perbaikan;
  - ⇒ Penjaminan Kualitas KLHS oleh Kepala Daerah;
  - ⇒ SK Tim Penyusun P-RPJMD;

- ⇒ Berita Acara Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang menyusun laporan KLHS;
- ⇒ Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD;
- ⇒ Daftar Hadir dan Notulensi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD;
- ⇒ Persetujuan Validasi KLHS;
- ⇒ Data dan Informasi lain-lain yang mendukung seperti: Foto proses penyusunan KLHS, Hasil Studi, Studi Kelayakan, Data-data, Peta, dan seterusnya.

#### **D. Validasi KLHS**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016, terhadap KLHS Kabupaten/Kota yang telah dibuat dan dilaksanakan wajib dilakukan validasi oleh Gubernur. Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan dilengkapi:

- Surat permohonan.
- Rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan KLHS.
- Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya.
- Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, pelaksanaan validasi KLHS terhadap RPJMD Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan pada tahap evaluasi rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/ kota oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

# CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

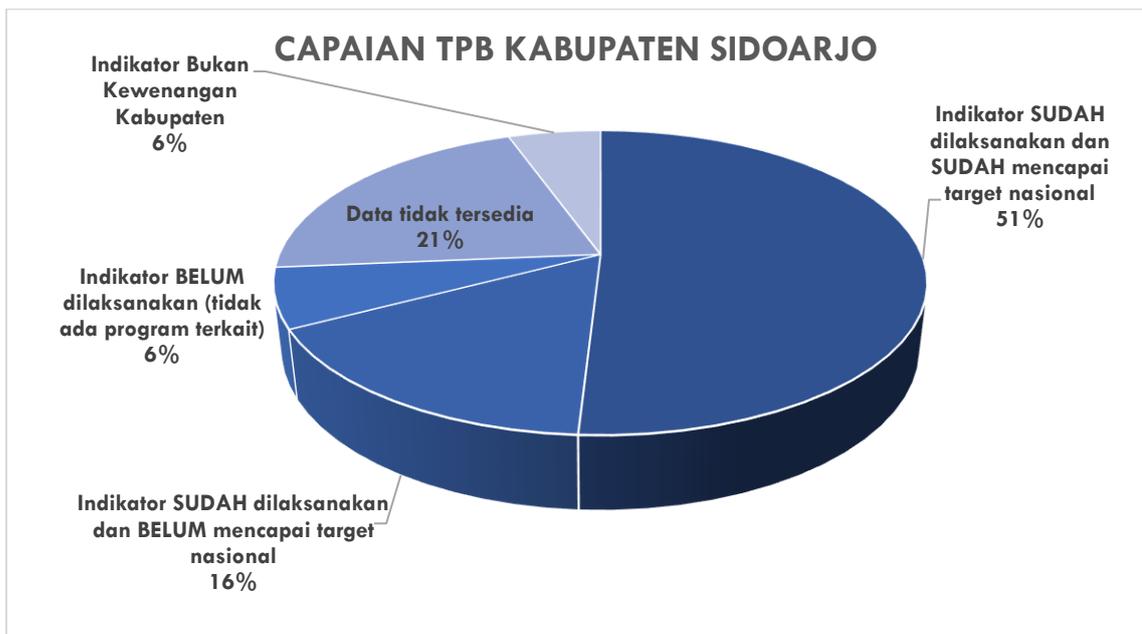
## 2.1 PELAKSANAAN TPB

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan.

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator (2), kondisi geografis (3) dan ketentuan indikator RPJMD (4). Kabupaten Sidoarjo telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 5 (lima) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target/BB
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

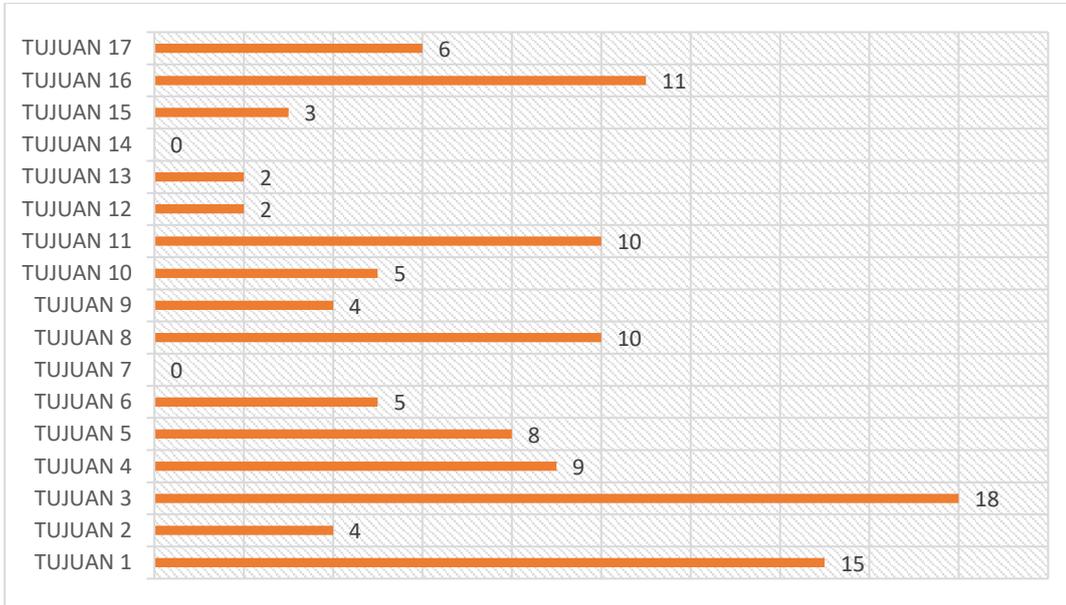
Indikator bukan kewenangan Kabupaten



Gambar 2.1 Capaian TPB Kabupaten Sidoarjo

### 2.1.1 Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)

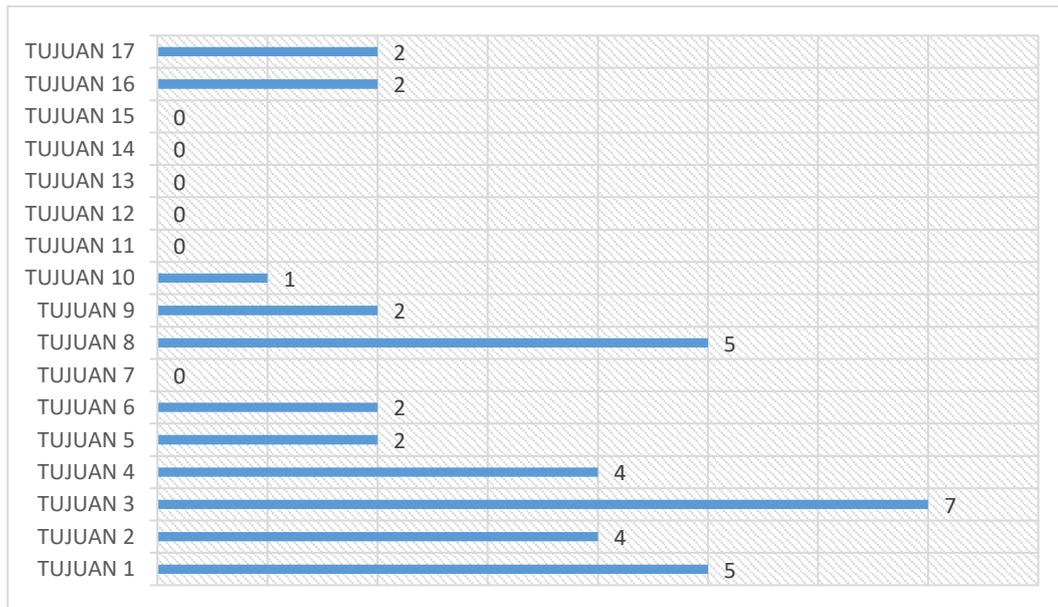
Dari keseluruhan indikator yang telah dikaji pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebesar 51%. Mayoritas indikator yang tercapai merupakan TPB Tujuan 3 yaitu sebesar 18 indikator dan TPB Tujuan 1 sebesar 15 indikator.



**Gambar 2.2** Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai

### 2.1.2 Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target (SB)

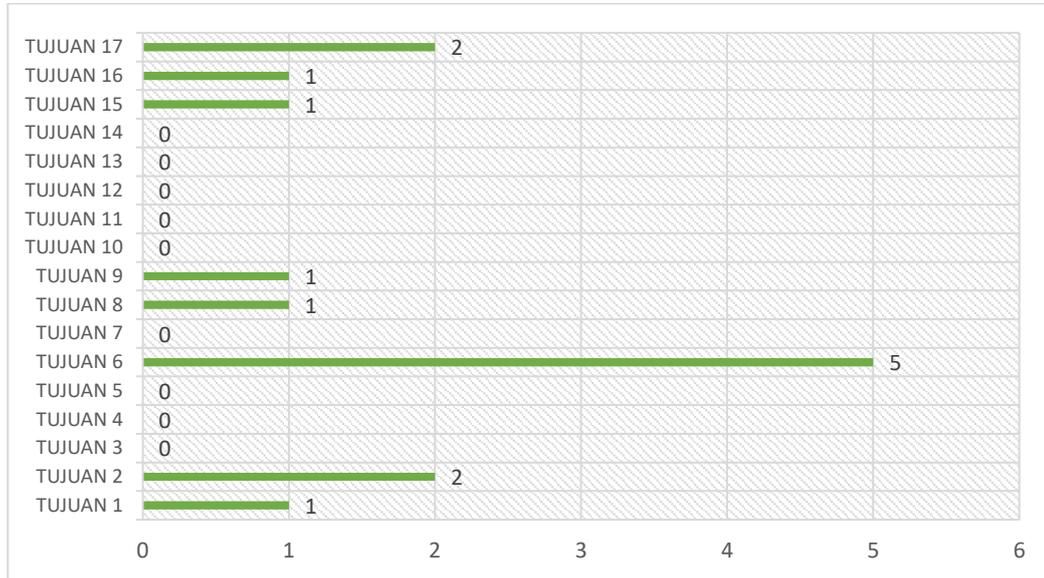
Dari keseluruhan indikator yang telah dikaji pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 16%. Mayoritas indikator yang tercapai merupakan TPB Tujuan 3 yaitu sebesar 7 indikator.



**Gambar 2.3** Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Belum Tercapai

### 2.1.3 Target TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

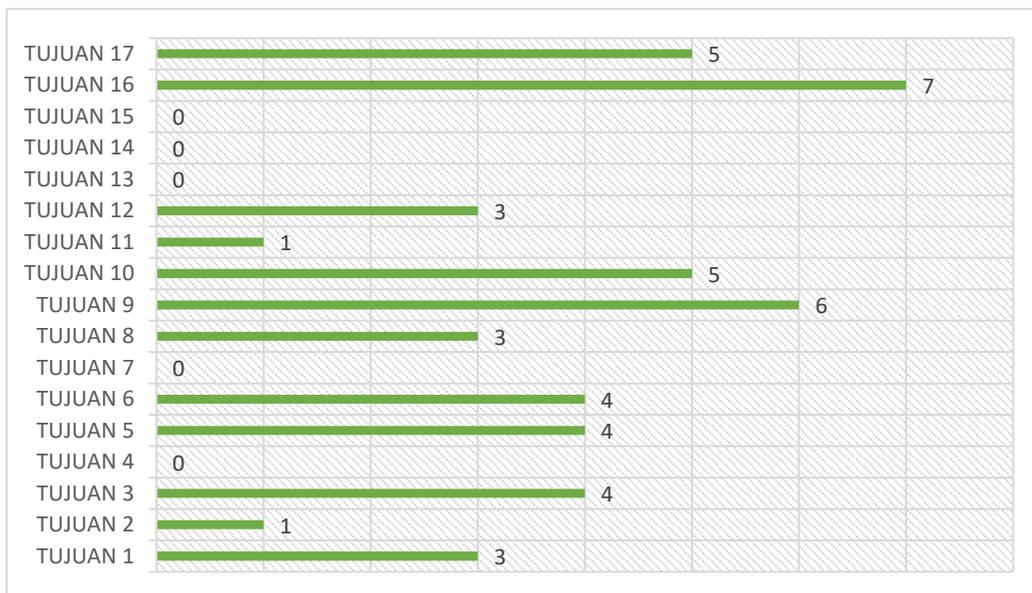
Dari keseluruhan indikator yang telah dikaji pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo yang belum dilaksanakan sebesar 6%.



**Gambar 2.4 Capaian TPB Belum Dilaksanakan, Belum Mencapai Target**

### 2.1.4 Target TPB Yang Belum/Tidak Ada Data (NA)

Dari keseluruhan indikator yang telah dikaji pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo yang belum atau tidak terdapat data sebesar 21%. Berikut merupakan gambar rincian target TPB yang belum atau tidak terdapat data:



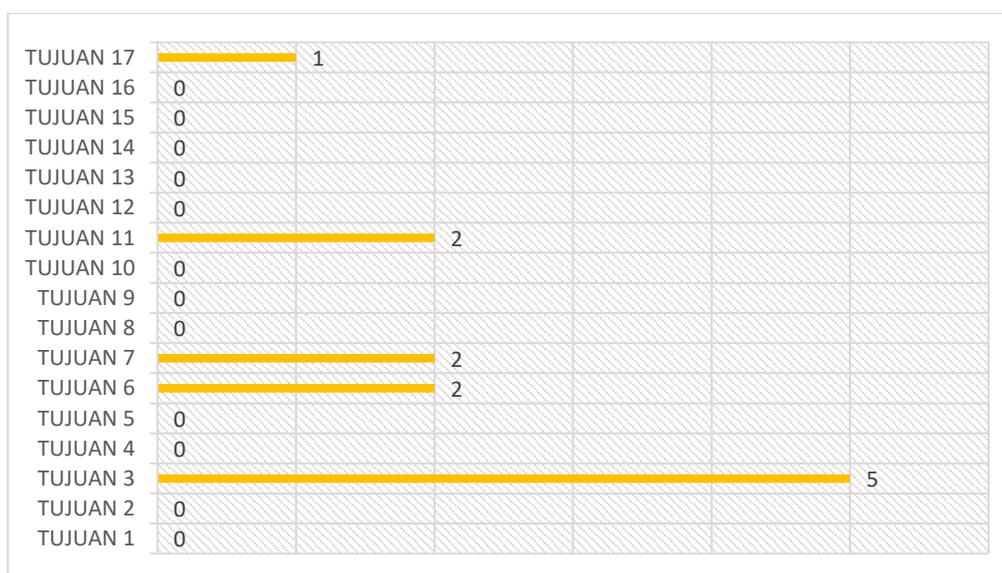
**Gambar 2.5 Capaian TPB Kategori Belum/Tidak Ada Data**

Tujuan dengan indikator yang tidak/belum memiliki data mayoritas terdapat di tujuan 9 dan 10 masing-masing sebanyak 5 indikator. Terdapat 5 tujuan yang secara keseluruhan memiliki data atau bukan kewenangan pemerintah daerah yaitu pada tujuan 4, tujuan 7, tujuan 12, tujuan 14 dan tujuan 15.

### 2.1.5 Indikator Bukan Kewenangan Kabupaten

Terdapat 12 indikator yang bukan merupakan kewenangan kabupaten Sidoarjo atau lingkup wilayah terlalu luas. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
2. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.
4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
5. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
6. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
7. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
8. Bauran energi terbarukan.
9. Intensitas energi primer.
10. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
11. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
12. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.



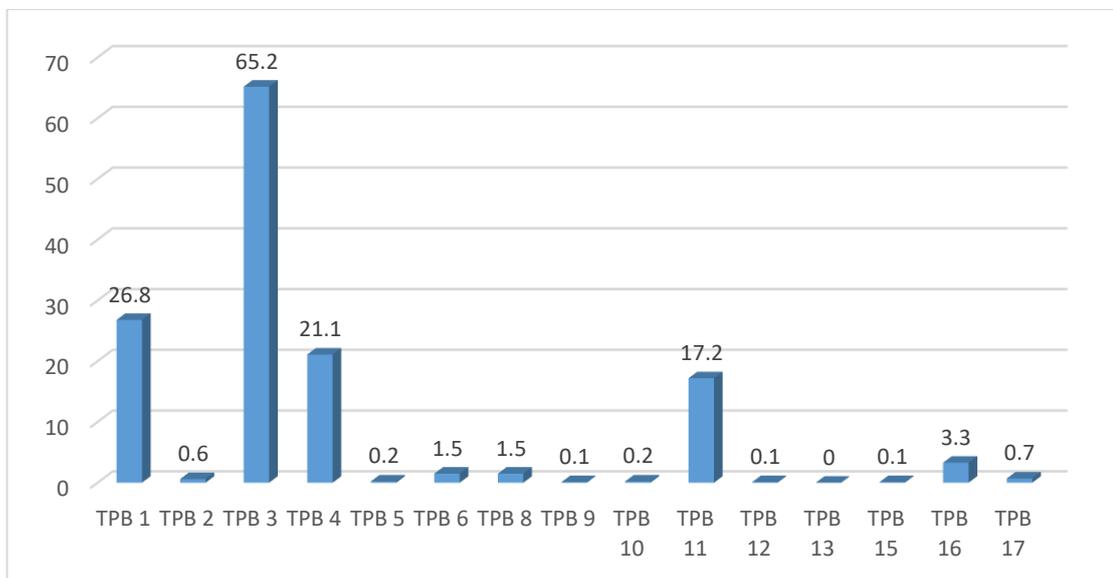
**Gambar 2.6 Capaian TPB Kategori Indikator Bukan Kewenangan Kabupaten**

## 2.2 KEMAMPUAN APBD UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT TPB

Analisis kemampuan APBD ini dilakukan dengan menunjukkan komposisi anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian ke-tujuh belas Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB). Data yang disajikan yakni rencana dan realisasi anggaran yang telah dipetakan ke dalam masing-masing indikator TPB dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Dengan menggunakan data series selama lima tahun dapat dilihat tren kemampuan APBD Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian TPB.

Penyerapan anggaran pada masing-masing TPB Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun secara umum menunjukkan nilai yang cukup baik. Rata-rata penyerapan anggaran selama lima tahun menunjukkan nilai diatas 50% untuk seluruh TPB. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan penyerapan anggaran tertinggi yakni TPB 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara), sedangkan TPB dengan penyerapan anggaran paling rendah yaitu TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan).



**Gambar 2.7 Grafik Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Total Realisasi Anggaran Per TPB Tahun 2020**

Apabila melihat proporsi anggaran pada masing-masing TPB terhadap total anggaran yang ada, maka dapat dilihat seperti pada grafik bahwa TPB dengan proporsi anggaran terbesar yakni TPB 3 dengan persentase sebesar 65.2% pada tahun 2020 dan persentase penyerapan anggaran di tahun yang sama sebesar 85.8%. Tujuan TPB 3 yakni Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

**Tabel 2.1 Kemampuan APBD Pada Masing-masing TPB**

TPB	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020					Rata-rata Realisasi Anggaran Per TPB 5 Tahun Terakhir	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Total Anggaran Per Tahun Per TPB					OPD Terkait
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020	
TPB 1	72.6%	76.1%	79.7%	83.6%	91.5%	80.7%	22.6%	28.4%	14.6%	20.5%	26.8%	BPBD, BPKAD, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinkes, Dinas P3AKB, Disdikbud, DPPCKTR, Disnaker
TPB 2	93.3%	69.4%	64.1%	78.2%	70.1%	75.0%	0.8%	1.4%	1.0%	0.9%	0.6%	Dinkes, Dinas Pangan Pertanian
TPB 3	68.0%	69.4%	77.6%	79.9%	85.8%	76.1%	47.9%	52.4%	53.8%	25.0%	65.2%	Dinkes, Dinas P3AKB
TPB 4	79.8%	79.7%	81.6%	87.2%	98.2%	85.3%	18.6%	26.6%	5.1%	22.0%	21.1%	Disdikbud, Disnaker
TPB 5	48.7%	89.4%	65.5%	97.6%	86.4%	77.5%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	Dinas Sosial, Dinkes, Dinas P3AKB, Diskominfo
TPB 6	96.7%	14.9%	62.7%	70.3%	34.7%	55.9%	4.2%	2.7%	18.9%	14.7%	1.5%	Dinkes, DPPCKTR, Dinas PU SDA, DLH
TPB 8	46.3%	66.3%	70.3%	73.0%	79.0%	67.0%	0.4%	0.9%	1.1%	1.4%	1.5%	BAPPEDA, BPKAD, Disnaker, Dinas Pangan Pertanian, Disporpar, Disperindag
TPB 9	73.6%	84.9%	97.0%	87.6%	93.3%	87.3%	0.1%	0.0%	0.4%	0.4%	0.1%	BAPPEDA, Dinas PU SDA, Diskominfo, DLH, Dishub, Disperindag
TPB 10	93.8%	90.0%	85.3%	95.1%	92.4%	91.3%	0.5%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	BAPPEDA, BPKAD, Bakesbangpol, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Disnaker, DPMD
TPB 11	84.9%	76.1%	86.2%	83.6%	80.7%	80.7%	0.7%	0.7%	19.1%	0.7%	17.2%	BPBD, BAPPEDA, DPPCKTR, DLH
TPB 12	92.4%	91.5%	40.5%	86.6%	67.0%	75.6%	1.4%	0.8%	0.8%	0.2%	0.1%	DLH
TPB 13	67.6%	65.4%	80.0%	93.1%	68.0%	74.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	BPBD
TPB 15	93.8%	92.3%	87.0%	83.6%	63.8%	84.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	DLH
TPB 16	90.5%	83.7%	88.1%	88.9%	91.0%	88.5%	1.0%	1.4%	1.5%	1.5%	3.3%	BPKAD, Bakesbangpol, BKD, Disdukcapil, Dinas P3AKB, Diskominfo
TPB 17	93.1%	88.3%	85.3%	79.6%	91.8%	87.6%	1.5%	1.6%	1.5%	1.6%	0.7%	BAPPEDA, BPKAD, BPPD, Disdukcapil, Diskominfo

Sumber : Data diolah, 2021

## 2.3 PERAN PIHAK DALAM PENCAPAIAN TPB

Salah satu dari tiga prinsip yang digunakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) selain *universal* (semua negara) dan *integratif* (dimensi social-ekonomi-lingkungan) adalah *no-one left behind*, yang berarti TPB harus memberi manfaat bagia semua, terutama pada kelompok rentan, serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan pembangunan ini melibatkan 4 (empat) *stakeholders* yaitu:

### A. Pemerintah dan Parlemen

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen dengan melaksanakan agenda Sustainable Development Goals ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, upaya pelaksanaan itu diwujudkan dengan pemberian kewenangan bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk masing-masing indikator TPB. OPD yang mengkoordinasi pemetaan kewenangan ini adalah Bappeda Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peran masing-masing OPD

### B. Akademisi dan Pakar

Fungsi akademisi dan pakar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan adalah:

1. Diseminasi hasil penelitian teknologi tepat guna untuk pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan limbah plastik untuk bahan bakar industri mikro dan kecil, sumur resapan dan lain-lain
2. Diseminasi hasil penelitian teknologi tepat guna untuk pengolahan air tanah menjadi air bersih.
3. Pendampingan pimpinan SD dan SMP dalam rangka lomba adiwiyata
4. Pengkajian keanekaragaman hayati di kawasan peisisir Kabupaten Sidoarjo

### C. Ormas dan Media

Secara spesifik beberapa peran yang dapat dilakukan kelompok masyarakat dan media dalam pelaksanaan TPB antara lain:

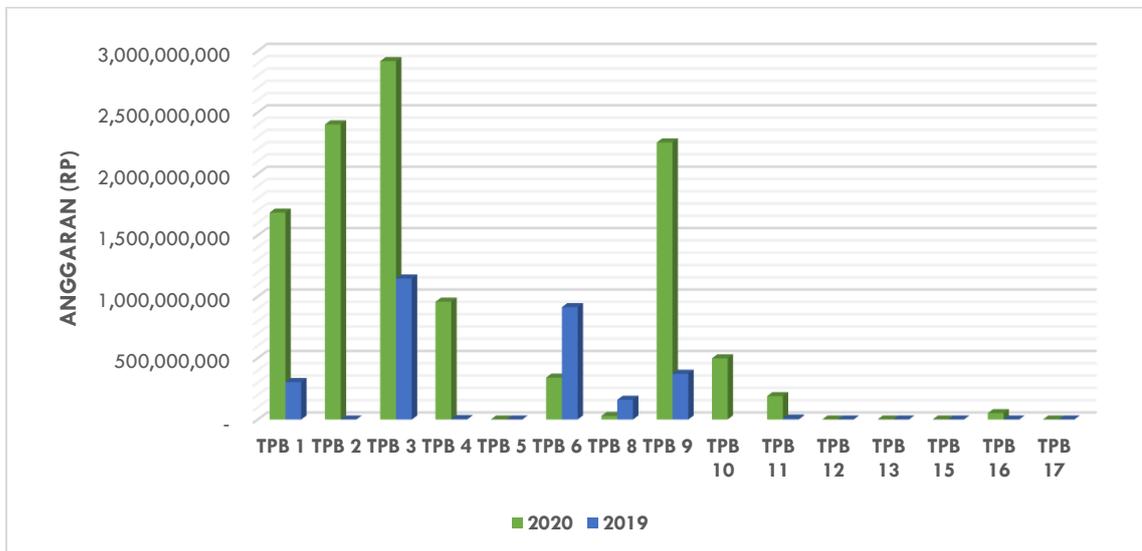
1. Membangun Pemahaman Publik tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.
2. Monitoring pelaksanaan pembangunan yang berpotensi mencemari kualitas lingkungan hidup, khususnya yang berpotensi menurunkan kualitas air permukaan Advokasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan kekerasan ibu dan anak.
3. Meningkatkan indeks partisipasi kasar pendidikan mulai dari TK sampai SMP, melalui pendirian sekolah swasta yang dikelola oleh ormas (Muhammadiyah, NU, dan lain-lain). Dapat dilihat melalui jumlah sekolah swasta yang ada di Kabupaten

Sidoarjo sejumlah 1.606 unit, yang terdiri dari TK 747 unit, Ra 308 unit, SD 114 unit, MI 237 unit, SMP 132 unit dan MTs 68 unit.

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan, melalui pendirian rumah sakit dan klinik yang mengkhususkan kesehatan ibu dan anak. Dapat dilihat melalui jumlah pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 28 unit.

D. Filantropi dan Bisnis

Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Biasanya, filantropi seorang kaya atau pebisnis yang sering menyumbang banyak amal dan membantu orang miskin dengan membentuk Yayasan amal. Filantropi dan pebisnis sangat diperlukan kontribusinya karena keberhasilan TPB. Pelaku usaha berperan dalam pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan lewat program CSR.



**Gambar 2.8 Grafik Perbandingan Anggaran CRS pada Masing-masing TPB Pada Tahun 2019-2020 di Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa kegiatan CSR di Kabupaten Sidoarjo meningkat pada tahun 2020 dengan total jumlah anggaran CSR yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 11,326,404,198.00. Anggaran tersebut tersebar untuk berbagai kegiatan yang mendukung capaian TPB 1, TPB 2, TPBS 3, TPB 4, TPB 6, TPB 8, TPB 9, TPB 10, TPB 11, dan TPB 16. Alokasi anggaran CSR paling tinggi pada tahun 2020 maupun tahun 2019 yaitu pada TPB 3.

# ISU STRATEGIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## 3.1 PENJARINGAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Isu Pembangunan Berkelanjutan pada kajian lingkungan hidup strategis ini adalah gambaran situasi yang dipandang penting untuk mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara praktis, yang dipandang sebagai isu dapat merupakan sebuah fenomena permasalahan yang saat ini sedang berlangsung atau belum berlangsung tetapi dipandang akan dapat mempengaruhi keseluruhan upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan baik secara social, ekonomi, lingkungan, maupun hukum dan tata Kelola administrasi daerah. Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam KLHS Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Penjaringan isu-isu pembangunan dari berbagai stakeholder yang dihimpun melalui diskusi publik dengan melibatkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
2. Pengelompokan isu-isu strategis yang telah dihimpun melalui diskusi publik ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Melakukan penapisan terhadap TPB prioritas di Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan capaian indikator TPB yang didapatkan dari hasil evaluasi capaian masing-masing indikator TPB serta dengan mempertimbangkan realisasi anggaran masing-masing TPB di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahap selanjutnya dari penyusunan KLHS, hasil dari identifikasi isu strategis ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan rekomendasi program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen terkait seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dokumen perencanaan lain ataupun berita pada media massa yang memiliki keterkaitan.

Penjaringan isu-isu berkelanjutan dilakukan pada saat proses Uji Publik I yang melibatkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dengan TPB**

Bidang	Calon Isu Strategis	Tujuan	TPB
Sosial (13 Isu dan 5 TPB)	Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan fasilitas social berupa air bersih	Tujuan 1	Infrastruktur dan permukiman berkelanjutan
	Masih ada 7,19% (atau sekitar 46.543 keluarga) yang belum memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)		
	Tingginya permukiman kumuh di Kabupaten Sidoarjo		
	Memiliki komoditi unggulan dalam berbagai sector yang berpeluang untuk pemenuhan kebutuhan local daerah sehingga dapat terciptanya swasembada pangan	Tujuan 2	Peningkatan produktifitas
	Belum adanya penetapan Kawasan pertanian menjadi LP2B		
	Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industry atau Kawasan terbangun lainnya		
	Banyaknya sentra industry kecil pengolahan makanan di Kabupaten Sidoarjo namun belum mendapatkan perhatian yang maksimal		
	Tingginya angka kematian dini akibat penyakit menular dan tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Tujuan 3	Kehidupan sehat
	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa Pendidikan	Tujuan 4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Tingginya angka kesenjangan social di Kabupaten Sidoarjo		
Rendahnya angka pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin			
Rendahnya partisipasi perempuan pada kursi parlemen dan pemerintah daerah	Tujuan 5	Kehidupan aman dan adil	
Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2012, 2013, 2017, 2018 dan 2019			
Lingkungan (5 Isu dan 4 TPB)	-	Tujuan 6	Air bersih dan sanitasi yang layak
	Masih rendahnya pemenuhan kawasan RTH perkotaan di Kabupaten Sidoarjo	Tujuan 11	Kota dan Permukiman berkelanjutan
	Kabupaten Sidoarjo belum memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana		
	Terdapat Jumlah kasus pengaduan lingkungan terkait limbah B3 pada tahun 2019 adalah sebanyak 14% dari total pengaduan lingkungan yang diterima (12 kasus limbah B3 dari 86 kasus pengaduan yang diterima)	Tujuan 12	Pengelolaan limbah
	Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi bencana khususnya bencana banjir	Tujuan 13	Penanganan bencana
	-	Tujuan 14	Perubahan Iklim
	Kabupaten Sidoarjo belum memiliki dokumen rencana pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	Tujuan 15	Pemanfaatan ekosistem
Ekonomi	-	Tujuan 7	Energi berkelanjutan

Bidang	Calon Isu Strategis	Tujuan	TPB
(6 Isu dan 4 TPB)	Masih rendahnya penciptaan lapangan kerja dalam mengurangi pengangguran	Tujuan 8	Lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
	Adanya potensi wisata geologi yang telah ditetapkan sebagai Geopark		
	Pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo yang cukup pesat membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai	Tujuan 9	Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur
	Industri manufaktur merupakan penyumbang PDRB utama di Kabupaten Sidoarjo		
	Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2012, 2013, 2017, 2018 dan 2019	Tujuan 10	Kehidupan aman dan adil
	Memiliki komoditi unggulan di berbagai sektor yang berpeluang untuk meningkatkan ekspor dan pemenuhan kebutuhan local daerah	Tujuan 17	Peningkatan produktivitas
Hukum dan Tata Kelola (1 Isu dan 1 TPB)	Reformasi birokrasi	Tujuan 16	Good Governance

### 3.2 PENENTUAN ISU PRIORITAS

Hasil pengelompokan usulan isu strategis dikelompokkan ke dalam 4 kategori bidang yaitu bidang social, ekonomi, lingkungan (ekologi), serta hukum dan tata kelola administrasi daerah. Selanjutnya, dilakukan penapisan dengan mengoperasionalkan teknik pembobotan terhadap masing-masing isu yang sudah terkelompokkan masing masing bidangnya. Adapun kriteria yang digunakan dalam pembobotan ini adalah:

1. Ketidaktercapaian indikator
2. Besaran perbandingan antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran
3. Besaran perbandingan antara realisasi anggaran per TPB dibandingkan dengan realisasi total anggaran
4. Keterkaitan dengan elemen D3TLH dan jasa ekosistem

Pembobotan masing-masing kriteria dilakukan dengan menggunakan metode pembagian kelas interval dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Pembobotan Masing-masing Kriteria Yang Digunakan Untuk Menentukan TPB Prioritas**

Kriteria	Kelas Interval
Ketidaktercapaian indikator	1 = 0-21.3%
	2 = 21.4%-42.7%
	3 = 42.8% - 64%
Perbandingan antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran	1 = 56.2% - 67.9%
	2 = 68% - 79.6%
	3 = 79.7% - 91.4%
Perbandingan antara realisasi anggaran per TPB dibandingkan dengan realisasi total anggaran	1 = 0.0% - 13.6%
	2 = 13.7% - 27.1%
	3 = 27.2% - 40.7%
Keterkaitan dengan elemen D3TLH dan jasa ekosistem	1 = 0-6
	2 = 7-13
	3 = 14-20

**Tabel 3.3 Pembobotan Untuk Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas**

No TPB	Capaian Indikator tiap TPB				Komposisi Anggaran untuk tiap TPB				KETERKAITAN DENGAN ELEMEN D3TLH DAN JASA EKOSISTEM (TOTAL JUMLAH JENIS D3TLH DAN JASA EKOSISTEM YANG TERKAIT)
	Jumlah Indikator Tercapai	Jumlah Indikator Belum Tercapai	Jumlah Indikator Tidak Tersedia Data	Persentase indikator yg belum tercapai terhadap total indikator	Rencana Anggaran (target)	Realisasi Anggaran (realisasi)	Perbandingan Target-Realisasi	Perbandingan realisasi tiap TPB terhadap total Realisasi	
1	15	6	3	25%	344,199,329,597	276,336,218,812	80.3%	18.8%	13
2	3	6	1	60%	15,796,255,857	11,507,148,534	72.8%	0.8%	16
3	18	7	4	24%	789,513,458,385	598,003,257,711	75.7%	40.7%	12
4	9	3	0	25%	268,360,509,126	228,576,583,182	85.2%	15.5%	1
5	8	2	4	14%	3,430,063,185	2,319,673,268	67.6%	0.2%	3
6	5	7	4	44%	182,524,656,368	102,594,766,578	56.2%	7.0%	12
7									
8	10	6	3	32%	18,859,687,846	16,422,715,989	87.1%	1.1%	11
9	4	4	5	31%	2,964,047,965	2,684,878,708	90.6%	0.2%	13
10	5	1	5	9%	4,436,337,964	4,053,980,254	91.4%	0.3%	0
11	10	0	1	0%	180,320,723,223	150,658,616,758	83.6%	10.2%	17
12	2	0	3	0%	59,805,959,725	41,406,537,530	69.2%	2.8%	20
13	2	0	0	0%	513,614,016	413,653,129	80.5%	0.0%	0
14									
15	3	1	0	25%	1,467,562,260	1,220,575,552	83.2%	0.1%	17
16	11	3	7	14%	23,855,235,506	21,202,938,017	88.9%	1.4%	0
17	6	4	5	27%	19,100,424,594	16,579,712,995	86.8%	1.1%	0
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>1,915,147,865,617</b>	<b>1,470,681,843,262</b>			

..lanjutan

No TPB	Capaian Indikator tiap TPB				PEMBOBOTAN (PENENTUAN TPB PRIORITAS)				Total Bobot	Keterangan
	Jumlah Indikator Tercapai	Jumlah Indikator Belum Tercapai	Jumlah Indikator Tidak Tersedia Data	Persentase indikator yg belum tercapai terhadap total indikator	Ketidaktercapaian Indikator	Besaran Perbandingan Anggaran Realisasi/Target	Besaran Perbandingan Realisasi Tiap Tpb/Realisasi Total	Keterkaitan Dengan Elemen D3TLH Dan Jasa Ekosistem		
1	15	6	3	25%	2	3	2	2	9	Prioritas Tinggi
2	3	6	1	60%	3	2	1	3	9	Prioritas Tinggi
3	18	7	4	24%	2	2	3	2	9	Prioritas Tinggi
4	9	3	0	25%	2	3	2	1	8	Prioritas Tinggi
5	8	2	4	14%	1	1	1	1	4	Prioritas Rendah
6	5	7	4	44%	3	1	1	2	7	Prioritas Sedang
7										
8	10	6	3	32%	2	3	1	2	8	Prioritas Tinggi
9	4	4	5	31%	2	3	1	1	7	Prioritas Sedang
10	5	1	5	9%	1	3	1	1	6	Prioritas Sedang
11	10	0	1	0%	1	2	1	3	7	Prioritas Sedang
12	2	0	3	0%	1	2	1	3	7	Prioritas Sedang
13	2	0	0	0%	1	3	1	1	6	Prioritas Sedang
14										
15	3	1	0	25%	1	2	1	3	7	Prioritas Sedang
16	11	3	7	14%	1	3	1	1	6	Prioritas Sedang
17	6	4	5	27%	2	3	1	1	7	Prioritas Sedang

Sumber : Hasil Analisis Tim KLHS, 2021

Berdasarkan hasil pembobotan, diperoleh hasil berupa TPB prioritas di Kabupaten Sidoarjo, antara lain tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 8. Selanjutnya, pada masing-masing TPB prioritas dilakukan pengelompokan terhadap indikator-indikator yang belum memenuhi target nasional dan belum dilaksanakan.

**Tabel 3.4 Indikator Yang Belum Mencapai Target Nasional dalam TPB Prioritas**

TPB Prioritas	Tujuan TPB Prioritas	Indikator Belum Mencapai Target dan Belum Dilaksanakan		
		No. Indikator	Indikator	OPD Terkait
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan
		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan
		2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pangan dan Pertanian
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pangan dan Pertanian
		2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pangan dan Pertanian
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan
		3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan

TPB Prioritas	Tujuan TPB Prioritas	Indikator Belum Mencapai Target dan Belum Dilaksanakan		
		No. Indikator	Indikator	OPD Terkait
		3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja
		8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Tenaga Kerja

## SKENARIO DAN REKOMENDASI

### 4.1 SKENARIO PENINGKATAN INDIKATOR TPB PRIORITAS

Skenario peningkatan indikator TPB prioritas yang belum mencapai target dilakukan melalui perhitungan proyeksi capaian sampai tahun 2030 dengan mempertimbangkan trend capaian dalam kurun waktu 2016-2020. Target nasional ditentukan berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020, sedangkan indikator dan satuan mengikuti tujuan pembangunan berkelanjutan. Perhitungan proyeksi capaian indikator dilakukan melalui dua tahap yakni proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) dan proyeksi dengan upaya tambahan. Seluruh indikator yang belum mencapai target pada TPB prioritas dilakukan proyeksi BAU untuk melihat proyeksi ketercapaian pada tahun 2024, apabila terdapat indikator yang masih belum mencapai target nasional setelah dilakukan proyeksi capaian, maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan untuk mencapai target RPJMN tahun 2024. Indikator TPB prioritas yang belum mencapai target adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Indikator TPB Prioritas Kabupaten Sidoarjo**

No	No Indikator	Indikator
1.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan Pendidikan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
2.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
3.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
4.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
5.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
6.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat 29 pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
7.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
8.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
9.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
10.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
11.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
12.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
13.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
14.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
15.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur $\leq 18$ tahun.
16.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi pendidikan atau sistem pendidikan masyarakat per 1000 penduduk.

No	No Indikator	Indikator
17.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
18.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
19.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
20.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
21.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
22.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
23.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
24.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
25.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
26.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
27.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.

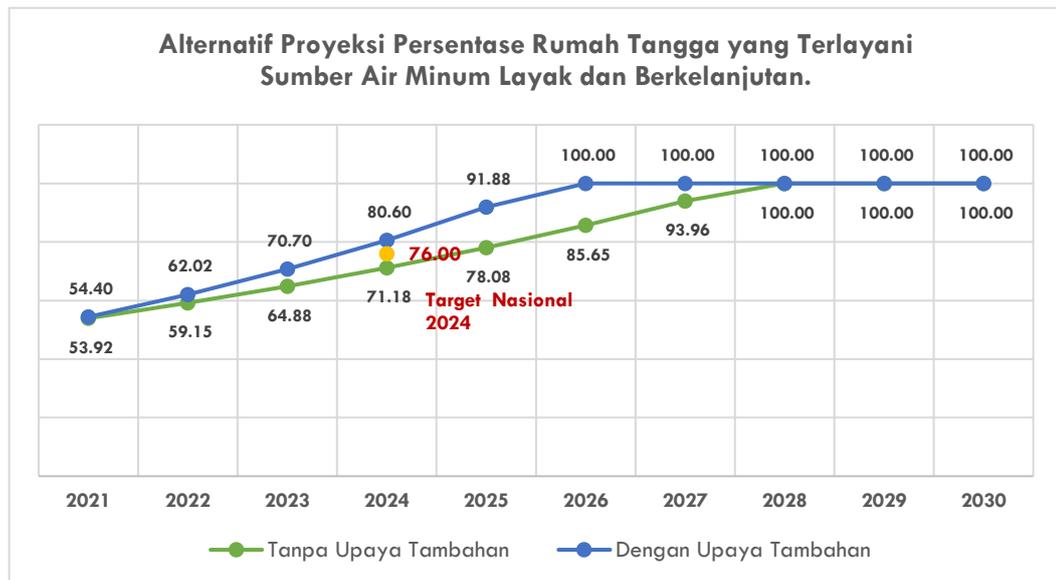
Perumusan skenario pencapaian TPB Prioritas Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 1.4.1 (d)**

<b>TPB Prioritas:</b> Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk di manapun		
<b>Target:</b> Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		
<b>Nomor indikator:</b> 1.4.1 (d)		
<b>Keterkaitan dengan D3TLH:</b> Indikator ini terkait dengan daya dukung air bersih. Berdasarkan hasil analisis D3TLH Kabupaten Sidoarjo, kualitas air Sungai Buntung dalam kondisi tercemar (berdasarkan baku mutu air kelas II) dengan nilai daya tampung yang telah terlampaui oleh beban pencemaran eksisting, sehingga diperlukan penurunan beban pencemaran pada hampir semua segmen sebesar 25 hingga 80%. Dari hasil Analisis tersebut dapat dikatakan D3TLH tidak mencukupi.		
<b>Proyeksi Capaian Indikator TPB :</b> Capaian indikator persentase rumah tangga yang terlayani sumber air minum layak dan berkelanjutan pada tahun 2020 sebesar 49.15%, dimana angka tersebut masih belum memenuhi target nasional di tahun yang sama. Proyeksi capaian indikator tanpa upaya tambahan (BAU) hingga tahun 2024 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan RPJMN 2020-2024, maka dari itu dihitung proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan bahwa target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2024, dengan persentase sebesar 80.60%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar di bawah ini		
<b>Tahun</b>	<b>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</b>	<b>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</b>

2021	53.92	54.40
2022	59.15	62.02
2023	64.88	70.70
2024	71.18	80.60
2025	78.08	91.88
2026	85.65	100.00
2027	93.96	100.00
2028	100.00	100.00
2029	100.00	100.00
2030	100.00	100.00

Berikut merupakan grafik proyeksi perbandingan antara capaian daerah dengan target nasional



**Permasalahan:**

Keterbatasan sumber daya air untuk pemenuhan air bersih masyarakat.

**Rekomendasi:**

- A. Sasaran :
  - Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat terhadap layanan sarpras permukiman dan perkotaan secara layak .
- B. Strategi dan Arah Kebijakan:
  - Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan melalui peningkatan sarana dan prasarana permukiman dan perkotaan.
- C. Program/Outcome:
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
- D. Instansi Pelaksana:
  - Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
  - Dinas Lingkungan Hidup
  - Dinas Kesehatan
- E. Kegiatan:
  - Pengembangan sistem penyediaan air minum

Sumber: Tim Penyusun KLHS P-RPJMD Kabupaten Sidoarjo, 2021

**Tabel 4.3 Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 2.1.2\***

<b>TPB Prioritas:</b> Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		
<b>Target:</b> Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		
<b>Nomor indikator:</b> 2.1.2*		
<b>Keterkaitan dengan D3TLH:</b> Tidak ada keterkaitan dengan D3TLH		
<b>Proyeksi Capaian Indikator TPB :</b> Indikator 2.1.2* merupakan salah satu indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan menggunakan asumsi capaian target nasional, dimana pada tahun 2024 hasil proyeksi masih belum memenuhi target RPJMN sebesar 4%. Sehingga diperlukan upaya tambahan untuk melaksanakan indikator tersebut.		
<b>Tahun</b>	<b>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</b>	<b>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</b>
2021	9.27	7.81
2022	8.81	6.25
2023	8.37	5.00
2024	7.95	4.00
2025	7.55	3.20
2026	7.17	2.56
2027	6.82	2.05
2028	6.47	1.64
2029	6.15	1.31
2030	5.84	1.05

Berikut merupakan grafik proyeksi perbandingan antara capaian daerah dengan target nasional

**Alternatif Proyeksi Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.**

Tahun	Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan
2021	9.27	7.81
2022	8.81	6.25
2023	8.37	5.00
2024	7.95	4.00
2025	7.55	3.20
2026	7.17	2.56
2027	6.82	2.05
2028	6.47	1.64
2029	6.15	1.31
2030	5.84	1.05

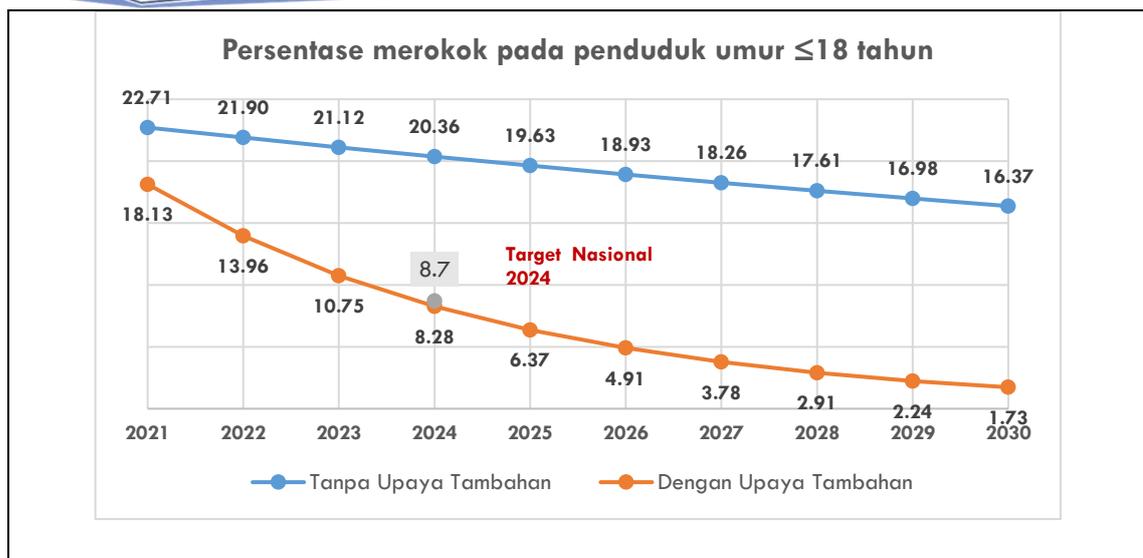
| **Permasalahan:** Belum adanya penetapan Kawasan pertanian menjadi LP2B, Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industry atau Kawasan terbangun lainnya | |

<b>Rekomendasi:</b>	
A. Sasaran :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya ketahanan pangan</li> </ul>
B. Strategi dan Arah Kebijakan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan ketahanan pangan pangan menuju swasembada pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok dan peningkatan upaya pengolahan hasil pertanian, Stabilisasi harga bahan pangan untuk memperbaiki/ meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas dan perbaikan kualitas konsumsi pangan</li> </ul>
C. Program/Outcome:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program ketahanan dan pengawasan pangan</li> </ul>
D. Instansi Pelaksana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pangan dan Pertanian</li> </ul>
E. Kegiatan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan capaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</li> </ul>

Sumber: Tim Penyusun KLHS P-RPJMD Kabupaten Sidoarjo, 2021

**Tabel 4.4 Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 3.4.1 (a)**

<b>TPB Prioritas:</b> Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		
<b>Target:</b> Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan pendidikan mental dan kesejahteraan.		
<b>Nomor indikator:</b> 3.4.1(a)		
<b>Keterkaitan dengan D3TLH:</b> Tidak terkait DDDTLH		
<b>Proyeksi Capaian Indikator TPB :</b> Capaian indikator 3.4.1(a) pada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo masih belum memenuhi target capaian nasional sebesar 9.1%, sedangkan nilai capaian indikator 3.4.1(a) untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar 23.55%. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan hingga tahun 2024 menunjukkan nilai 20.36% dimana nilai tersebut masih belum memenuhi target RPJMN 2024 sebesar 8.7%. Untuk memenuhi target nasional pada tahun 2024, maka dilakukan proyeksi dengan usaha tambahan sehingga pada tahun 2024 proyeksi capaian indikator 3.4.1(a) sebesar 8.28% dan telah memenuhi target RPJMN 2024.		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2021	22.71	18.13
2022	21.90	13.96
2023	21.12	10.75
2024	20.36	8.28
2025	19.63	6.37
2026	18.93	4.91
2027	18.26	3.78
2028	17.61	2.91
2029	16.98	2.24
2030	16.37	1.73
Berikut merupakan grafik proyeksi perbandingan antara capaian daerah dengan target nasional		



**Permasalahan:**

**Rekomendasi:**

A. Sasaran :

- Meningkatkan Kesehatan masyarakat

B. Strategi dan Arah Kebijakan:

- Meningkatkan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

C. Program/Outcome:

- Peningkatan derajat 34endidika masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan 34endidika bagi penderita akibat dampak rokok

D. Instansi Pelaksana:

- Dinas Kesehatan

E. Kegiatan:

- Penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat tentang bahaya rokok
- Pengaturan iklan rokok
- Menggalakkan kampanye “Kawasan Tanpa asap Rokok (KTR)”

Sumber: Tim Penyusun KLHS P-RPJMD Kabupaten Sidoarjo, 2021

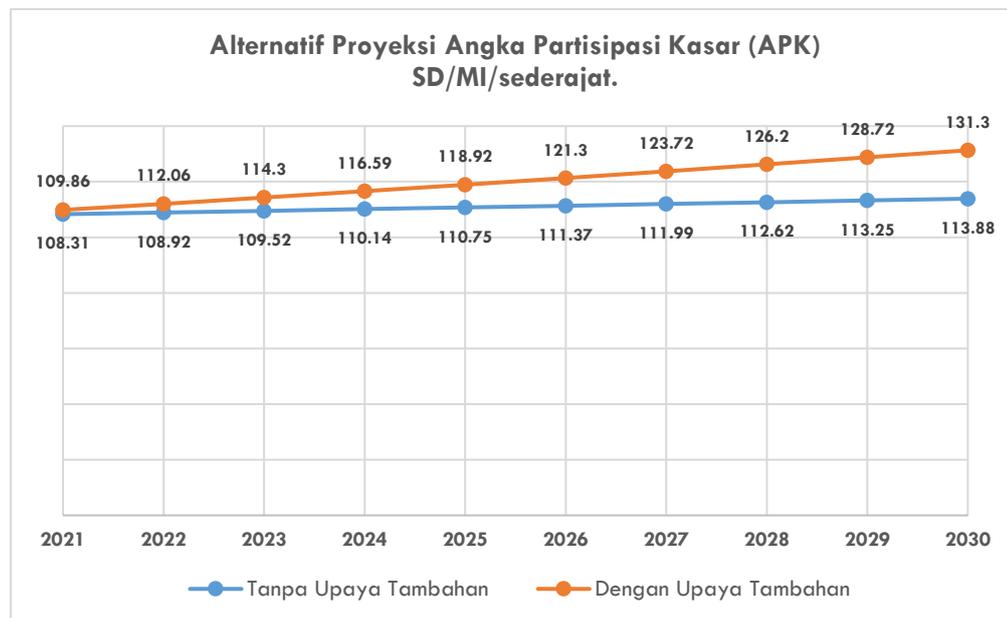
**Tabel 4.5 Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 4.1.1(d)**

<b>TPB Prioritas:</b> Pendidikan berkualitas
<b>Target:</b> Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
<b>Nomor indikator:</b> 4.1.1(d)
<b>Keterkaitan dengan D3TLH:</b> Tidak terkait DDDTLH
<b>Proyeksi Capaian Indikator TPB :</b> Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai pada tahun 2020 adalah 109.96. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Narasi RPJMN 2020-2024 maupun PBB di tahun 2030, yaitu 114.09 pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2030 dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2017 s.d. tahun 2020. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau

dalam kondisi BAU (Business Analysis Usually). Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target tahun 2024 dan tahun 2030. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2024 dan 2030. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan proyeksi dengan upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2021	108.31	109.86
2022	108.92	112.06
2023	109.52	114.3
2024	110.14	116.59
2025	110.75	118.92
2026	111.37	121.3
2027	111.99	123.72
2028	112.62	126.2
2029	113.25	128.72
2030	113.88	131.3

Berikut merupakan grafik proyeksi perbandingan antara capaian daerah dengan target nasional



**Permasalahan:**

Tingginya angka kesenjangan social di Kabupaten Sidoarjo, Rendahnya angka pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin

**Rekomendasi:**

A. Sasaran :

- Meningkatkan kualitas Pendidikan ketrampilan dan Pendidikan luar sekolah untuk seluruh masyarakat serta penguatan sistem penjaminan kualitas 35endidikan

B. Strategi dan Arah Kebijakan:

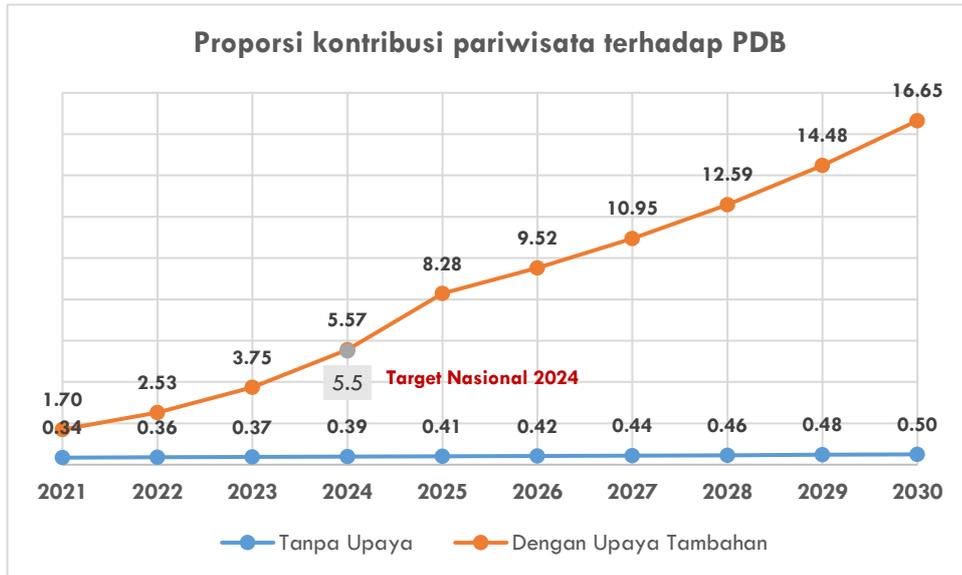
- Meningkatkan akses 36endidikan bagi segala usia baik formal maupun informal untuk meningkatkan daya saing SDM serta pengembangan pemanfaatan teknologi inofrmasi untuk Pendidikan masyarakat
- C. Program/Outcome:
- Program Pengelolaan Pendidikan
- D. Instansi Pelaksana:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- E. Kegiatan:
- Pembangunan dan rehabilitasi SD
  - Penyediaan dana BOSDA SD

Sumber: Tim Penyusun KLHS P-RPJMD Kabupaten Sidoarjo, 2021

**Tabel 4.6 Perumusan Skenario Pencapaian TPB Prioritas Indikator 8.9.1\***

<b>TPB Prioritas:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua		
<b>Target:</b> Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		
<b>Nomor indikator:</b> 8.9.1*		
<b>Keterkaitan dengan D3TLH:</b> Indikator 8.9.1* terkait dengan DDDTLH yaitu rekreasi ekowisata. Berdasarkan hasil analisisjasa ekosistem rekreasi dan ekowisata, kemampuan daya dukung lingkungan jasa ekowisata terbagi dalam kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Jasa ekosistem ekowisata didominasi oleh daya dukung kelas sangat rendah dengan luas 36,967.93 Hektar atau sebesar 50.92%. Sedangkan daya dukung kelas rendah dengan luas 27,370.05 atau sebesar 37.70%.		
<b>Proyeksi Capaian Indikator TPB :</b> Capaian indikator 8.9.1* pada tahun 2020 sebesar 0.33%. Nilai tersebut masih jauh apabila dibandingkan dengan target nasional di tahun yang sama yakni sebesar 4.8%. Proyeksi capaian indikator 8.9.1* hingga pada tahun 2024 masih jauh dari target RPJMN 2024, dimana target RPJMN tahun 2024 sebesar 5.5% sedangkan proyeksi capaian tahun 2024 sebesar 0.39%. Untuk memenuhi target nasional, maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan sehingga menghasilkan nilai proyeksi capaian indikator 8.9.1* pada tahun 2024 sebesar 5.57%.		
<b>Tahun</b>	<b>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</b>	<b>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</b>
2021	0.34	1.70
2022	0.36	2.53
2023	0.37	3.75
2024	0.39	5.57
2025	0.41	8.28
2026	0.42	9.52
2027	0.44	10.95
2028	0.46	12.59
2029	0.48	14.48
2030	0.50	16.65

Berikut merupakan grafik proyeksi perbandingan antara capaian daerah dengan target nasional



**Permasalahan:**

Kelas DDTLH untuk ekowisata sebagian besar sangat rendah, selain itu sektor pariwisata bukan merupakan potensi utama Kabupaten Sidoarjo.

**Rekomendasi:**

- A. Sasaran :
  - Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat
- B. Strategi dan Arah Kebijakan:
  - Meningkatkan pendapatan per kapita dari sektor pariwisata
- C. Program/*Outcome*:
  - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- D. Instansi Pelaksana:
  - Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- E. Kegiatan:
  - Penyelenggaraan festival dan promosi wisata daerah

Sumber: Tim Penyusun KLHS P-RPJMD Kabupaten Sidoarjo, 2021

## 4.2 REKOMENDASI

Skenario rekomendasi merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Sidoarjo, serta indikator kinerja daerah maupun indikator urusan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan perumusan skenario dalam bab sebelumnya yang memprakirakan kondisi lingkungan hidup dan juga target indikator TPB yang belum tercapai dan belum menjadi indikator maka secara umum rekomendasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.7 Perumusan Rekomendasi KLHS Pilar Sosial**

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
<b>TPB Prioritas Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</b>								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan pendidikan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Rendahnya jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	Persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk seharusnya 72%	Fasilitas dan monev penyelenggaraan jaminan kesehatan	Program penguatan kesehatan masyarakat dan program pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Penyediaan Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat miskin	Meningkatkan pencapaian pada tahun 2024 hingga 82% dengan adanya Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Pentingnya imunisasi dasar untuk anak umur 12-23 untuk mengurangi risiko penyakit menular maupun tidak menular	Persentase anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap sebesar 30,83%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program penguatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan obat dan vaksin	Penyediaan pelayanan kesehatan melalui posyandu dan polindes	Meningkatkan pencapaian pada tahun 2024 hingga 90% melalui pelayanan kesehatan desa seperti posyandu dan polindes	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur berstatus kawin sebagai program keluarga berencana	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur tahun 2020 sebesar 50,61%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pengelolaan keluarga bencana	Pembinaan keluarga berencana	Meningkatkan pencapaian pada tahun 2024 hingga 63,4% melalui sarana kesehatan desa	Dinas Kesehatan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air	Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan	Tidak terdapat data pencapaian tahun 2020	Fasilitas peningkatan kemampuan dan akses masyarakat	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air	Pengelolaan sumber daya alam dan menyalin	Meningkatkan pencapaian pada tahun 2024 hingga 76% dengan menyalin kerjasama dengan swasta	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
	minum layak dan berkelanjutan.	fasilitas social berupa air bersih		terhadap layanan sarpras permukiman dan perkotaan secara layak	Minum dan Sanitasi	kerjasama dengan swasta	dalam penyediaan dan pengelolaan sumber air	dan Tata Ruang
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Masih ada 7,19% (atau sekitar 46.543 keluarga) yang belum memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)	4.1% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Fasilitas peningkatan kemampuan dan akses masyarakat terhadap layanan sarpras permukiman dan perkotaan secara layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Pengadaan layanan sanitasi komunal dan menjalin kerjasama dengan swasta	Meningkatkan aksesibilitas terhadap sanitasi berkelanjutan sebesar 100% melalui kerjasama dengan swasta dengan adanya sanitasi komunal	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	Zona potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo berupa zona rawan bencana lumpur, zona rawan bencana kekeringan dll	Tidak terdapat data pencapaian tahun 2020	Penanggulangan bencana	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana	Meningkatkan kapasitas/kesiapan masyarakat dalam mitigasi bencana terutama pada daerah rawan bencana hingga 70% melalui pemerintah desa dengan adanya penyuluhan dan pelatihan jika terjadi bencana	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
<b>TPB Prioritas Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</b>								
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Tingginya angka prevelensi kekurangan gizi pada anak balita	Prevelensi balita kekurangan gizi sebesar 9,3%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pemberdayaan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan	Pelaksanaan dan pembinaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat dan monev pelaksanaan dan pembinaan perbaikan gizi	Menurunkan angka prevalensi balita kekurangan gizi hingga angka 7% melalui pembinaan perbaikan gizi keluarga melalui sarana kesehatan desa	Dinas Kesehatan

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
						keluarga dan masyarakat		
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Tingginya angka prevelensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Prevelensi balita malnutrisi sebesar 14,9%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pemberdayaan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan	Pelaksanaan dan pembinaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat dan monev pelaksanaan dan pembinaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat	Menurunkan angka prevalensi balita malnutrisi hingga angka 7% melalui pembinaan perbaikan gizi keluarga melalui sarana kesehatan desa	Dinas Kesehatan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	1,7% penduduk usia produktif bekerja di bidang pertanian	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebesar Rp 33.113,00	Program Penyuluhan Pertanian	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian dan perikanan	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian dan pendampingan program PUAP dan pembinan pelatian keterampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat	Meningkatkan nilai tambah tenaga kerja disektor pertanian hingga 59.8 juta rupiah per tahun melalui program PUAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Potensi perikanan budidaya tersebar di Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo,	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program peningkatan peganekaragaman, kewaspadaan pangan dan gizi dan ketahanan pangan daerah	Analisis pola pangan harapan konsumsi pangan	Meningkatkan konsumsi ikan hingga sebesar 95.2% melalui meningkatkan daya beli hasil perikanan lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
		Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong dan Kecamatan Jabon. Ikan yang dibudidayakan meliputi dorang, lancam, sembilang, pari, kakap, tawes, mujair dan nila. Selain itu juga organisme air lain yang dibudidayakan seperti kerang, udang, rajungan/kepiting, kupang dan keong laut.	ikan sebesar 39.68%					
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Memiliki komoditi unggulan dalam berbagai sector yang berpeluang untuk pemenuhan kebutuhan local daerah sehingga dapat terciptanya swasembada pangan, Belum adanya penetapan Kawasan pertanian menjadi	Tidak terdapat data capaian karena indikator belum dilaksanakan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program peningkatan peganekaragaman, kewaspadaan pangan dan gizi dan ketahanan pangan daerah	Analisis pola pangan harapan konsumsi pangan	Menurunkan angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan hingga kurang dari 5% melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
		LP2B, Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industry atau Kawasan terbangun lainnya						
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Memiliki komoditi unggulan dalam berbagai sector yang berpeluang untuk pemenuhan kebutuhan local daerah sehingga dapat terciptanya swasembada pangan, Belum adanya penetapan Kawasan pertanian menjadi LP2B, Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industry atau Kawasan terbangun lainnya	Lahan pertanian yang semakin berkurang dan jumlah penduduk miskin semakin meningkat pada tahun 2020	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program peningkatan peganekaragaman, kewaspadaan pangan dan gizi dan ketahanan pangan daerah	Analisis pola pangan harapan konsumsi pangan	Pemantapan ketahanan pangan pangan menuju swasembada pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok dan peningkatan upaya pengolahan hasil pertanian, Stabilisasi harga bahan pangan untuk memperbaiki/ meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas dan perbaikan kualitas konsumsi pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
<b>TPB Prioritas Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</b>								
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Tingginya angka kematian dini akibat penyakit menular dan tidak menular, melalui pencegahan dan	Persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per	Fasilitas dan monev penyelenggaraan jaminan kesehatan	Program penguatan kesehatan masyarakat dan program pembinaan akses	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan	Meningkatkan pencapaian pada tahun 2024 hingga 82% dengan adanya Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat miskin	Dinas Kesehatan

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
		pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	1000 penduduk seharusnya 72%		dan mutu pelayanan kesehatan			
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Tingginya angka penyalahgunaan narkoba pada remaja	Prevelensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0.03% sedangkan target nasional sebesar 0.02%	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza	Menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga 0.02% dengan adanya penyuluhan pada karang taruna pada setiap desa	Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Tingginya angka kematian dini akibat penyakit menular dan tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Tahun 2020 terdapat 56% kasus yang memerlukan intervensi terhadap penyakit yang terabaikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	pembinaan dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Menurunkan angka jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tiropis yag terabaikan hingga 0 kasus melalui sarana kesehatan yang ada di desa	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Tingginya angka remaja dan siswa yang mengkonsumsi rokok	Persentase penduduk usia ≤18 tahun yang merokok sebesar 23.55%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok	Menurunkan angka persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun hingga sebesar 8.7% melalui peningkatan kawasan bebas rokok pada sarana pelayanan umum	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan	Tingginya angka kematian dini akibat penyakit	Persentase penduduk yang dicakup asuransi	Fasilitas dan monev penyelenggaraan jaminan kesehatan	Program penguatan kesehatan	Penyediaan Kartu Indonesia Sehat	Meningkatkan pencapaian pada tahun 2024 hingga 82% dengan adanya Kartu	Dinas Kesehatan

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
	atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	menular dan tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk seharusnya 71.8%		masyarakat dan program pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan	bagi masyarakat miskin	Indonesia Sehat bagi masyarakat miskin	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur berstatus kawin sebagai program keluarga berencana	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur tahun 2020 sebesar 25.12%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pengelolaan keluarga bencana	Pembinaan keluarga berencana	Meningkatkan pencapaian proporsi jumlah perempuan atau pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi modern hingga 60% melalui sarana kesehatan desa seperti posyandu dan polindes	Dinas Kesehatan
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur berstatus kawin sebagai program keluarga berencana	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur tahun 2020 sebesar 25.12%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pengelolaan keluarga bencana	Pembinaan keluarga berencana	Meningkatkan pencapaian proporsi jumlah perempuan atau pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi semua cara hingga 60% melalui sarana kesehatan desa seperti posyandu dan polindes	Dinas Kesehatan
<b>TPB Prioritas Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</b>								
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Tingginya angka kesenjangan social di Kabupaten Sidoarjo, Rendahnya angka pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin	Rasio siswa SD/MI/ sederajat yang termasuk umur 16-18 tahun seharusnya mencapai 114.09%	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarpras permukiman dan perkotaan termasuk pendidikan secara layak	Program Pendidikan Dasar	Pembangunan dan rehabilitasi bangunan SD, Pelatihan dan penyusunan naskah evaluasi, fasilitas implementasi	Meningkatkan APK SD/MI/ Sederajat hingga 116% melalui pemberian beasiswa atau peningkatan fasilitas pendukung sekolah seperti komputer, peralatan musik dll	Dinas Pendidikan dan Budaya

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
						kurikulum, penyelenggaraan PPDB, dan pemberian beasiswa		
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Tingginya angka kesenjangan social di Kabupaten Sidoarjo, Rendahnya angka pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin	Rasio siswa SMP/MTs/ sederajat yang termasuk umur 16-18 tahun seharusnya mencapai 106.94%	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarpras permukiman dan perkotaan termasuk pendidikan secara layak	Program Pendidikan Menengah	Fasilitas implementasi kurikulum, Penyelenggaraan PPDB, pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan pemberian beasiswa	Meningkatkan APK SMP/MTs/ Sederajat hingga 108% melalui pemberian beasiswa atau peningkatan fasilitas pendukung ekstrakurikuler sekolah	Dinas Pendidikan dan Budaya

**Tabel 4.8 Perumusan Rekomendasi KLHS Pilar Ekonomi**

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
<b>TPB Prioritas Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Masih rendahnya penciptaan lapangan kerja dalam mengurangi pengangguran, Adanya potensi wisata geologi yang telah ditetapkan sebagai Geopark	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun seharusnya diatas 2.80%	Meningkatkan tingkat produktivitas ekonomi melalui kualitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja hingga 4.5% melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Kontribusi pariwisata relatif rendah terhadap PDB Kabupaten Sidoarjo	Kontribusi pariwisata terhadap PDB Kab Sidoarjo sebesar 0.33%	Peningkatan 4 pilar pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan festival dan promosi wisata daerah	Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 5.5% melalui promosi pariwisata daerah dan perbaikan sarana pendukung pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Lapangan kerja informal sektor non-pertanian seperti PK5, tukang becak dll didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki	Tahun 2020 data yang tersedia negatif (-)	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Meningkatkan lapangan kerja formal hingga 51% melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja

Indikator Prioritas		Isu Terkait Indikator	Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Skenario Pencapaian	Instansi
No Indikator	Indikator Prioritas							
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Angka tenaga kerja formal di Kabupaten Sidoarjo relatif tinggi pada sektor industri	Persentase angka tenaga kerja formal sebesar 11,4% dan standar nasional sebesar 51%	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Meningkatkan lapangan kerja formal hingga 51% melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	1,7% penduduk usia produktif bekerja di bidang pertanian	Persentase angka tenaga kerja informal sektor sebesar 18,4% dan standar nasional sebesar 89.5%	Program Penyuluhan Pertanian	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian dan perikanan	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian dan pendampingan program PUAP dan pembinan pelatian keterampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat	Meningkatkan tenaga kerja informal sektor pertanian hingga 44% melalui perlindungan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Tenaga Kerja
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo relatif besar yang tersebar di setiap kecamatan namun angka akses UMKM terhadap layanan keuangan relatif rendah	Indikator 8.3.1.(c) belum dilaksanakan sehingga tidak tersedia data	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan hingga 25% melalui penyediaan pinjaman dengan bunga kecil bagi pelaku UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
Jl. Raya Siwalanpanji No 36, Buduran  
Telp (031) 8963184

